

DEMOKRASI ISLAM DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA DISRUPSI DIGITAL

Rakhmat Syawal

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

rakhmatsyawal2@gmail.com

Aris Fadlan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

arisfadlan27@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama, mengeksplorasi peluang potensial, dan merumuskan strategi untuk memanfaatkan teknologi digital dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi Islam seperti syura (musyawarah), keadilan, dan persamaan. Dengan pendekatan kualitatif berbasis analisis tematik literatur Miles, Huberman, & Saldana, penelitian ini menganalisis publikasi akademik, laporan pemerintah, dan sumber sekunder kredibel lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi polarisasi sosial akibat penyebaran misinformasi dan ujaran kebencian, serta rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat Muslim. Namun, terdapat peluang signifikan dalam pemanfaatan media sosial dan teknologi big data untuk memperluas partisipasi politik, menyebarkan nilai-nilai moderasi, dan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem digital. Strategi yang diusulkan mencakup peningkatan literasi digital, integrasi nilai-nilai Islam dalam kerangka digital, dan transformasi moderasi beragama melalui teknologi digital. Penelitian ini berkontribusi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan teknologi digital untuk mendukung demokrasi yang inklusif dan adaptif. Rekomendasi praktis diberikan kepada lembaga pendidikan, partai politik Islam, dan organisasi masyarakat untuk mengoptimalkan peluang digital sekaligus menghadapi tantangan kontemporer.

Kata Kunci: Demokrasi, Islam, Indonesia, Disrupsi Digital

Abstract

This study aims to identify key challenges, explore potential opportunities, and formulate strategies for leveraging digital technology to strengthen Islamic democratic values such as syura (consultation), justice, and equality. Using a qualitative approach based on thematic analysis of literature Miles, Huberman, & Saldana, this research analyzes relevant academic publications, government reports, and credible secondary sources. The findings reveal that the primary challenges include social polarization caused by the spread of misinformation and hate speech, as well as limited digital literacy among the Muslim population. However, significant opportunities exist in utilizing social media and big data

technologies to expand political participation, disseminate values of moderation, and integrate Islamic principles into digital systems. Proposed strategies include enhancing digital literacy, integrating Islamic values into digital frameworks, and transforming religious moderation through digital tools. This study contributes to the integration of Islamic values and digital technology to support inclusive and adaptive democracy. Practical recommendations are provided for educational institutions, Islamic political parties, and community organizations to optimize digital opportunities while addressing contemporary challenges.

Keywords: Democracy, Islam, Indonesia, Digital Disruption

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, demokrasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks, terutama dengan adanya peran nilai-nilai Islam dalam diskursus politik. Demokrasi Islam di Indonesia kerap dianggap sebagai model unik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam seperti syura (musyawarah) dengan nilai-nilai universal demokrasi seperti keadilan, kebebasan, dan persamaan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan interpretasi di kalangan ulama dan intelektual Muslim, sebagian besar mendukung sinergi antara Islam dan demokrasi. Syura dalam Islam sering dianggap sebagai padanan demokrasi karena menekankan musyawarah dalam pengambilan keputusan kolektif¹.

Namun, munculnya era disrupsi digital menghadirkan tantangan baru bagi demokrasi Islam. Polarisasi berbasis agama, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian menjadi masalah yang mendesak. Penelitian menunjukkan bahwa literasi digital yang rendah memperburuk dampak negatif disrupsi digital terhadap masyarakat, khususnya dalam konteks politik berbasis agama². Di sisi lain, digitalisasi juga membuka peluang besar bagi demokrasi Islam untuk memperkuat inklusivitas dan partisipasi politik dengan memanfaatkan teknologi seperti media sosial dan big data³.

Masalah utama yang dihadapi demokrasi Islam di Indonesia adalah dampak negatif era digital yang memperburuk fragmentasi sosial dan politik berbasis agama. Polarisasi masyarakat, yang diperparah oleh misinformasi di media sosial, mengancam kohesi sosial dan stabilitas demokrasi. Selain itu,

¹ Muhammad Taufik dan Ardillah Abu, "ISLAM DAN DEMOKRASI," *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 1 (3 Februari 2020): 1–14, <https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol1.Iss1.1>.

² Gema Irhamdhika, "Mitigasi hoax di era disrupsi melalui literasi digital," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2022): 39–46; Naimatus Tsaniyah dan Kannisa Ayu Juliana, "LITERASI DIGITAL SEBAGAI UPAYA MENANGKAL HOAKS DI ERA DISRUPSI," *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (30 Juni 2019): 121–40, <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1555>.

³ Ican Mandala, Doli Witro, dan Juraidi Juraidi, "Transformasi Moderasi Beragama Berbasis Digital 2024: Sebagai Bentuk Upaya Memfilter Konten Radikalisme Dan Ekstremisme Di Era Disrupsi: Digital-Based Religious Moderation Transformation 2024: An Effort to Filter Radicalism and Extremism Content in the Age of Disruption," *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 1 (31 Juli 2024): 127–60, <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1242>; Ali Mustopa Yakub Simbolon Mustopa dan Iswanti Iswanti, "Pengembangan Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Di Era Disrupsi," *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan* 15, no. 1 (16 Juni 2023): 1–12, <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v15i1.1565>.

keterbatasan literasi digital di kalangan masyarakat Muslim memperbesar risiko terpapar informasi palsu yang dapat memicu konflik⁴. Kelemahan partai politik Islam dalam merespons tantangan ini semakin memperburuk situasi, terutama dalam hal kurangnya strategi yang relevan untuk menghadapi perubahan dinamis di era disrupsi digital⁵.

Solusi umum untuk mengatasi masalah ini adalah melalui peningkatan literasi digital dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung penyebaran nilai-nilai Islam yang moderat dan demokratis. Penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama berbasis digital, seperti pelibatan generasi muda dalam kampanye toleransi melalui media sosial, efektif dalam menangkalkan konten radikal dan memperkuat nilai-nilai demokrasi⁶. Selain itu, integrasi nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan Islam juga diakui sebagai langkah strategis untuk membangun generasi yang adaptif terhadap perubahan global⁷.

Penelitian terbaru menyoroti pentingnya penerapan literasi digital dalam masyarakat Muslim sebagai solusi untuk menghadapi tantangan demokrasi Islam di era digital. Irhamdhika menemukan bahwa literasi digital strategis melalui pendidikan di sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat meningkatkan daya kritis masyarakat dalam memilah informasi valid dan menangkalkan hoaks⁸. Literasi digital juga mendorong partisipasi yang lebih bermakna dalam diskursus politik⁹.

Selain itu, penggunaan teknologi big data dan media sosial telah diakui sebagai alat potensial untuk meningkatkan partisipasi politik berbasis Islam. Penelitian Mandala et al menunjukkan bahwa media digital dapat digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama, meningkatkan kesadaran publik, dan melibatkan generasi muda dalam isu-isu politik¹⁰. Strategi ini dapat memperkuat keterlibatan politik masyarakat Muslim secara inklusif dan mengurangi dominasi kelompok ekstremis dalam ruang digital.

Penelitian Nurfazri dan Agustin menyoroti bahwa demokrasi dapat sejalan dengan nilai-nilai Islam jika disesuaikan dengan syariat¹¹. Pendekatan ini menekankan pentingnya prinsip musyawarah, keadilan, dan persamaan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem demokrasi modern¹². Integrasi ini menciptakan landasan moral yang kuat untuk mengatasi tantangan era disrupsi digital.

⁴ Irhamdhika, "Mitigasi hoax di era disrupsi melalui literasi digital"; Kiki Muhamad Hakiki, "Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 1 (1 Februari 2016): 1–17, <https://doi.org/10.15575/jw.v1i1.583>.

⁵ Gondo Yumitro, "Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia | Yumitro | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik," diakses 25 Januari 2025, <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10892>.

⁶ Kadek Hengki Primayana dan Putu Yulia Angga Dewi, "Manajemen Pendidikan Dalam Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital," *Tampung Penyang* 19, no. 1 (30 Juni 2021): 45–59, <https://doi.org/10.33363/tampung-penyang.v19i1.695>; Mandala, Witro, dan Juraidi, "Transformasi Moderasi Beragama Berbasis Digital 2024."

⁷ Naili Rohmah Ifitah, "View of ISLAM DAN DEMOKRASI," diakses 25 Januari 2025, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/islamuna/article/view/557/538>.

⁸ Irhamdhika, "Mitigasi hoax di era disrupsi melalui literasi digital."

⁹ Irhamdhika.

¹⁰ Mandala, Witro, dan Juraidi, "Transformasi Moderasi Beragama Berbasis Digital 2024."

¹¹ Deva Nurfazri dan Dwi Nur Agustin, "Islam and Democracy: A Study of Maudhu'i's Interpretation: Islam Dan Demokrasi: Kajian Tafsir Maudhu'i," *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 2 (5 Juni 2024): 289–310, <https://doi.org/10.69526/bir.v2i2.23>.

¹² Nurfazri dan Agustin.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas hubungan Islam dan demokrasi serta tantangan di era digital, beberapa kesenjangan penelitian masih perlu diatasi. Sebagian besar studi, seperti yang dilakukan oleh Hakiki dan Yumitro, berfokus pada aspek historis dan politis dari demokrasi Islam tanpa memberikan solusi konkret untuk mengatasi tantangan digital¹³. Selain itu, meskipun literasi digital telah diidentifikasi sebagai solusi potensial, implementasi strategis literasi digital dalam konteks demokrasi Islam belum banyak dibahas¹⁴.

Penelitian yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam, seperti syura, dengan teknologi modern juga masih terbatas. Kajian Nurfazri dan Agustin memberikan dasar teoritis yang kuat, tetapi kurang menekankan pada aspek praktis dan aplikatifnya¹⁵. Selain itu, meskipun ada penelitian tentang moderasi beragama berbasis digital, seperti yang dilakukan oleh Mandala et al, upaya untuk mengembangkan partisipasi politik berbasis Islam dengan teknologi digital masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut¹⁶.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tantangan utama yang dihadapi demokrasi Islam di Indonesia dalam era disrupsi digital, terutama terkait dengan fenomena polarisasi sosial, penyebaran hoaks, dan rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada pengungkapan berbagai peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat demokrasi Islam melalui teknologi digital, seperti penggunaan media sosial dan big data dalam mendukung partisipasi politik yang inklusif. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan rekomendasi strategis yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan politik masyarakat berbasis nilai-nilai Islam, dengan menekankan pentingnya literasi digital, transformasi moderasi beragama, dan integrasi prinsip-prinsip Islam dalam sistem digital.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan teknologi modern untuk memperkuat demokrasi Islam di Indonesia. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip syura dan literasi digital, penelitian ini memberikan kontribusi unik dalam konteks demokrasi berbasis Islam di era digital. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis tantangan dan peluang demokrasi Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks media sosial, big data, dan literasi digital. Studi ini juga mencakup rekomendasi praktis bagi partai politik Islam, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi digital secara strategis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur yang berfokus pada analisis dokumen dari berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber data meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, serta artikel yang relevan dengan topik demokrasi Islam di era disrupsi digital. Pemilihan dokumen dilakukan berdasarkan kredibilitas dan relevansi dengan tujuan

¹³ Hakiki, "Islam dan Demokrasi"; Yumitro, "Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia | Yumitro | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik."

¹⁴ Irhamdhika, "Mitigasi hoax di era disrupsi melalui literasi digital."

¹⁵ Nurfazri dan Agustin, "Islam and Democracy."

¹⁶ Mandala, Witro, dan Juraidi, "Transformasi Moderasi Beragama Berbasis Digital 2024."

penelitian. Sampel data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen yang relevan, seperti artikel jurnal yang terindeks, buku ilmiah, dan laporan kebijakan dari lembaga akademik atau pemerintah. Proses seleksi dilakukan secara purposif untuk memastikan hanya dokumen yang memiliki validitas tinggi dan relevansi terhadap prinsip-prinsip demokrasi Islam, seperti syura, keadilan, dan kesetaraan, yang dianalisis.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik menggunakan tiga tahapan utama yang dijelaskan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014): reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang tidak relevan, sementara penyajian data dilakukan dalam bentuk matriks dan diagram untuk mengidentifikasi pola-pola tematik. Proses ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak analisis kualitatif untuk memastikan keakuratan dan efisiensi dalam pengolahan data.

Validitas dan reliabilitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber data, termasuk studi literatur dari jurnal yang berbeda serta dokumen kebijakan terkait. Analisis data dilakukan menggunakan teknik pengkodean tematik untuk mengidentifikasi pola-pola tematik dalam dokumen. Hasil analisis dibandingkan dengan kerangka konseptual yang relevan untuk memastikan konsistensi temuan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif dengan merujuk pada pendekatan interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Demokrasi Islam di Era Disrupsi Digital

Tantangan utama yang dihadapi demokrasi Islam di era disrupsi digital adalah meningkatnya polarisasi sosial akibat penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten ekstremis di ruang digital. Kajian menunjukkan bahwa media sosial sering digunakan untuk menyebarkan narasi yang memecah belah masyarakat berbasis identitas agama¹⁷. Hal ini diperburuk oleh rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, yang membuat mereka rentan terhadap manipulasi informasi¹⁸.

Selain itu, fragmentasi internal umat Islam juga menjadi tantangan signifikan dalam memajukan demokrasi Islam. Penelitian Gonda Yumitro menemukan bahwa fragmentasi ini, ditambah dengan politisasi agama oleh elit politik, telah melemahkan daya tarik partai Islam di tengah masyarakat Muslim Indonesia¹⁹.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Taufik dan Abu, yang menyoroti adanya hubungan antagonistik antara demokrasi dan Islam ketika nilai-nilai agama digunakan sebagai alat politik yang eksklusif. Syura, sebagai prinsip Islam yang sejalan dengan demokrasi, sering diabaikan dalam praktik politik yang hanya menonjolkan simbol-simbol agama tanpa mengutamakan musyawarah dan keadilan²⁰.

¹⁷ Irhamdhika, "Mitigasi hoax di era disrupsi melalui literasi digital."

¹⁸ Tsaniyah dan Juliana, "LITERASI DIGITAL SEBAGAI UPAYA MENANGKAL HOAKS DI ERA DISRUPSI."

¹⁹ Yumitro, "Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia | Yumitro | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik."

²⁰ Taufik dan Abu, "ISLAM DAN DEMOKRASI."

Literatur lain juga menunjukkan bahwa demokrasi Islam dapat menghadapi kendala ketika dihadapkan pada pandangan sekuler yang terlalu liberal. Eva Iryani mengkritik demokrasi Barat yang dianggap terlalu sekuler, sehingga sulit diselaraskan dengan konsep teokrasi Islam. Namun, ia juga menegaskan bahwa syura dalam Islam dapat menjadi dasar untuk memperkuat demokrasi yang inklusif dan berbasis nilai-nilai Islam²¹. Meski begitu, tantangan di era digital dapat dikelola melalui moderasi beragama berbasis teknologi digital. Penelitian Mandala et al menunjukkan bahwa media digital, jika dikelola dengan tepat, dapat digunakan untuk menyebarkan narasi toleransi dan inklusivitas, yang mendukung demokrasi Islam di tengah masyarakat multikultural²².

Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa tantangan disrupsi digital bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah nilai dan etika. Literasi digital yang rendah berkontribusi pada disinformasi, sehingga membahayakan kohesi sosial dan nilai-nilai demokrasi Islam. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat Muslim menjadi prioritas, sebagaimana disarankan oleh Tsaniyah dan Juliana²³. Selain itu, penting untuk mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi Islam seperti syura, agar dapat diadaptasi dalam konteks digital. Pendekatan tafsir *maudhu'i* yang digunakan oleh Nurfazri dan Agustin menunjukkan bahwa prinsip-prinsip musyawarah, keadilan, dan persamaan dalam Al-Qur'an dapat menjadi landasan moral yang relevan untuk memperkuat demokrasi Islam di era modern²⁴.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya strategi terpadu yang mengintegrasikan teknologi digital dengan nilai-nilai Islam untuk mengatasi polarisasi sosial. Teknologi digital dapat digunakan untuk mempromosikan moderasi beragama, memperkuat pendidikan politik, dan meningkatkan partisipasi demokratis masyarakat Muslim (Primayana & Dewi, 2021). Integrasi ini tidak hanya memperkuat demokrasi Islam, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai agama dapat memberikan kontribusi positif dalam menghadapi tantangan global.

Peluang Demokrasi Islam di Era Disrupsi Digital

Era disrupsi digital menawarkan peluang besar bagi demokrasi Islam untuk memperkuat partisipasi politik berbasis nilai-nilai Islam. Media sosial dan teknologi digital menjadi alat penting untuk menyebarkan narasi moderasi dan toleransi yang sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian menunjukkan bahwa media digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi politik

²¹ Eva Iryani, "HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (25 Juli 2017): 24–31, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.

²² Mandala, Witro, dan Juraidi, "Transformasi Moderasi Beragama Berbasis Digital 2024."

²³ Tsaniyah dan Juliana, "LITERASI DIGITAL SEBAGAI UPAYA MENANGKAL HOAKS DI ERA DISRUPSI."

²⁴ Nurfazri dan Agustin, "Islam and Democracy."

generasi muda Muslim, sekaligus menangkal radikalisme melalui penyebaran konten yang inklusif²⁵.

Selain itu, pendekatan tafsir Al-Qur'an menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, seperti musyawarah (syura), keadilan, dan persamaan, dapat diintegrasikan dengan teknologi digital untuk memperkuat proses pengambilan keputusan kolektif²⁶. Teknologi big data juga memberikan peluang untuk menganalisis kebutuhan masyarakat Muslim secara lebih akurat, sehingga kebijakan berbasis nilai-nilai Islam dapat dirumuskan secara lebih efektif.

Peluang yang dihadirkan era disrupsi digital sejalan dengan temuan Iryani, yang menyoroti relevansi syura sebagai prinsip musyawarah Islam dalam penguatan demokrasi modern. Demokrasi Islam dapat berkembang jika nilai-nilai keadilan dan partisipasi politik berbasis syariat diadaptasi dalam konteks digital²⁷. Hal ini juga diperkuat oleh Taufik dan Abu, yang menjelaskan bahwa hubungan integralistik antara Islam dan demokrasi dapat diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi untuk mendukung prinsip-prinsip syura²⁸.

Di sisi lain, penelitian Mandala et al menyoroti pentingnya transformasi moderasi beragama berbasis digital untuk menangkal narasi ekstremisme²⁹. Hal ini menjadi peluang besar bagi demokrasi Islam untuk menggunakan media digital dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme, yang mendukung inklusivitas dalam proses demokrasi³⁰. Sementara itu, pendidikan Islam yang mengintegrasikan demokrasi dan teknologi juga menjadi sarana strategis untuk membangun kesadaran politik generasi muda Muslim di era digital³¹.

Temuan ini memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa disrupsi digital bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang besar untuk memperkuat demokrasi Islam. Dengan memanfaatkan media digital, nilai-nilai Islam seperti syura dan keadilan dapat disebarkan secara luas, memperkuat partisipasi politik masyarakat Muslim di Indonesia. Pendekatan ini juga memungkinkan partai politik Islam dan organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan kampanye mereka, sekaligus membangun kesadaran politik yang lebih inklusif³².

Implikasi utama dari temuan ini adalah perlunya strategi yang terintegrasi untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mempromosikan demokrasi Islam. Digitalisasi manajemen pendidikan Islam, sebagaimana diusulkan oleh Simbolon dan Iswantir, juga dapat mendukung peningkatan literasi politik masyarakat Muslim. Selain itu, penggunaan big data untuk memahami kebutuhan masyarakat memberikan peluang bagi pemerintah dan organisasi berbasis Islam untuk membuat kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim³³.

²⁵ Mandala, Witro, dan Juraidi, "Transformasi Moderasi Beragama Berbasis Digital 2024"; Primayana dan Dewi, "Manajemen Pendidikan Dalam Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital."

²⁶ Nurfazri dan Agustin, "Islam and Democracy."

²⁷ Iryani, "HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA."

²⁸ Taufik dan Abu, "ISLAM DAN DEMOKRASI."

²⁹ Mandala, Witro, dan Juraidi, "Transformasi Moderasi Beragama Berbasis Digital 2024."

³⁰ Mandala, Witro, dan Juraidi.

³¹ Iftitah, "View of ISLAM DAN DEMOKRASI."

³² Primayana dan Dewi, "Manajemen Pendidikan Dalam Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital"; Mandala, Witro, dan Juraidi, "Transformasi Moderasi Beragama Berbasis Digital 2024."

³³ Mustopa dan Iswantir, "Pengembangan Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Di Era Disrupsi."

Dengan memanfaatkan teknologi secara strategis, demokrasi Islam di Indonesia tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga berkembang sebagai model yang relevan dengan tantangan zaman. Ini juga memberikan contoh kepada dunia bahwa Islam dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi tanpa kehilangan esensi nilai-nilainya.

Strategi Memanfaatkan Peluang

Strategi utama untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan era disrupsi digital adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti syura (musyawarah) dan keadilan ke dalam penggunaan teknologi digital. Kajian menunjukkan bahwa pendidikan Islam berbasis teknologi dapat memainkan peran penting dalam membangun literasi digital masyarakat Muslim, yang mendukung partisipasi politik dan sosial yang lebih inklusif³⁴.

Penggunaan media sosial sebagai sarana dakwah dan moderasi beragama juga menjadi strategi yang efektif. Penelitian Mandala et al menekankan pentingnya generasi muda sebagai duta moderasi untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi melalui media digital³⁵. Selain itu, adopsi teknologi big data memungkinkan organisasi berbasis Islam untuk memahami kebutuhan masyarakat dengan lebih baik, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif dan relevan³⁶.

Strategi-strategi ini sejalan dengan temuan Taufik dan Abu, yang menyatakan bahwa hubungan integralistik antara Islam dan demokrasi dapat diperkuat melalui pengadopsian teknologi untuk mendukung prinsip syura. Teknologi digital memungkinkan musyawarah dalam skala yang lebih luas, termasuk melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan³⁷.

Iryani juga menyoroti bahwa partisipasi politik yang berbasis syariat dapat diperkuat melalui pemanfaatan teknologi, terutama dalam memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dan kesetaraan tetap menjadi dasar dalam demokrasi Islam³⁸. Lebih lanjut, penelitian Mandala et al dan Primayana & Dewi mendukung pentingnya digitalisasi dalam menyebarkan narasi moderasi, yang menjadi kunci untuk menangkal ekstremisme dan polarisasi sosial di era digital³⁹.

Namun, dibandingkan strategi-strategi di negara-negara Barat yang fokus pada demokrasi sekuler, strategi yang diusulkan untuk demokrasi Islam memberikan keunikan karena mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral dalam penggunaannya. Hal ini juga didukung oleh pendekatan tafsir maudhu'i

³⁴ Iftitah, "View of ISLAM DAN DEMOKRASI"; Nurfazri dan Agustin, "Islam and Democracy."

³⁵ Mandala, Witro, dan Juraidi, "Transformasi Moderasi Beragama Berbasis Digital 2024."

³⁶ Primayana dan Dewi, "Manajemen Pendidikan Dalam Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital"; Mustopa dan Iswanti, "Pengembangan Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Di Era Disrupsi."

³⁷ Taufik dan Abu, "ISLAM DAN DEMOKRASI."

³⁸ Iryani, "HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA."

³⁹ Mandala, Witro, dan Juraidi, "Transformasi Moderasi Beragama Berbasis Digital 2024"; Primayana dan Dewi, "Manajemen Pendidikan Dalam Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital."

dari Nurfazri dan Agustin, yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Al-Qur'an dapat diadaptasi dalam konteks teknologi modern⁴⁰.

Strategi memanfaatkan peluang digital ini sangat penting karena tidak hanya mendukung partisipasi politik masyarakat Muslim tetapi juga memperkuat posisi demokrasi Islam sebagai model yang inklusif dan adaptif di era modern. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam teknologi digital, strategi ini dapat membantu mengatasi tantangan polarisasi sosial dan radikalisme, sekaligus mempromosikan toleransi dan harmoni dalam masyarakat⁴¹.

Implikasi dari strategi ini adalah perlunya peningkatan literasi digital di lembaga pendidikan Islam sebagai langkah awal membangun generasi Muslim yang sadar akan potensi teknologi. Pendidikan Islam yang berorientasi pada demokrasi, seperti yang disarankan oleh Ifitah, dapat memberikan fondasi yang kuat untuk mendorong partisipasi politik yang berbasis nilai-nilai Islam⁴².

Selain itu, partai politik Islam dan organisasi masyarakat di Indonesia dapat memanfaatkan teknologi big data untuk memahami kebutuhan konstituen mereka dan membuat kebijakan yang lebih responsif. Strategi ini tidak hanya memperkuat demokrasi Islam, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai agama memberikan kontribusi yang konstruktif dalam menghadapi tantangan global (Simbolon & Iswanti, 2023; Taufik & Abu, 2020). Dengan demikian, strategi-strategi ini memberikan arah yang jelas untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat penggerak demokrasi Islam yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa era disrupsi digital memberikan tantangan dan peluang bagi demokrasi Islam di Indonesia. Tantangan utama meliputi polarisasi sosial akibat penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, serta kurangnya literasi digital di masyarakat. Namun, disrupsi digital juga membuka peluang besar untuk memperkuat demokrasi Islam melalui pemanfaatan media sosial dan teknologi big data, yang memungkinkan penyebaran nilai-nilai Islam seperti syura, keadilan, dan persamaan secara lebih luas. Strategi yang diusulkan dalam penelitian ini meliputi peningkatan literasi digital melalui pendidikan, integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem digital, serta transformasi moderasi beragama dengan memanfaatkan teknologi. Studi literatur yang dilakukan mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi secara strategis dapat mendukung partisipasi politik yang inklusif, sekaligus menangkal narasi ekstremisme dan polarisasi. Ke depan, diperlukan pengembangan model implementasi digital yang lebih spesifik untuk mendukung demokrasi Islam di Indonesia, terutama dalam konteks multikultural. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat landasan konseptual dan praktis bagi keberlanjutan demokrasi Islam di era digital, serta menawarkan rekomendasi strategis bagi pemangku kepentingan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang era disrupsi.

⁴⁰ Nurfazri dan Agustin, "Islam and Democracy."

⁴¹ Mandala, Witro, dan Juraidi, "Transformasi Moderasi Beragama Berbasis Digital 2024"; Primayana dan Dewi, "Manajemen Pendidikan Dalam Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital."

⁴² Ifitah, "View of ISLAM DAN DEMOKRASI."

Referensi

- Hakiki, Kiki Muhamad. "Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 1 (1 Februari 2016): 1–17. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i1.583>.
- Iftitah, Naili Rohmah. "View of ISLAM DAN DEMOKRASI." Diakses 25 Januari 2025.
- Irhamdhika, Gema. "Mitigasi hoax di era disrupsi melalui literasi digital." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2022): 39–46.
- Iryani, Eva. "HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (25 Juli 2017): 24–31. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.
- Mandala, Ican, Doli Witro, dan Juraidi Juraidi. "Transformasi Moderasi Beragama Berbasis Digital 2024: Sebagai Bentuk Upaya Memfilter Konten Radikalisme Dan Ekstremisme Di Era Disrupsi: Digital-Based Religious Moderation Transformation 2024: An Effort to Filter Radicalism and Extremism Content in the Age of Disruption." *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 1 (31 Juli 2024): 127–60. <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1242>.
- Mustopa, Ali Mustopa Yakub Simbolon, dan Iswantir Iswantir. "Pengembangan Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Di Era Disrupsi." *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan* 15, no. 1 (16 Juni 2023): 1–12. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v15i1.1565>.
- Nurfazri, Deva, dan Dwi Nur Agustin. "Islam and Democracy: A Study of Maudhu'i's Interpretation: Islam Dan Demokrasi: Kajian Tafsir Maudhu'i." *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 2 (5 Juni 2024): 289–310. <https://doi.org/10.69526/bir.v2i2.23>.
- Primayana, Kadek Hengki, dan Putu Yulia Angga Dewi. "Manajemen Pendidikan Dalam Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital." *Tampung Penyang* 19, no. 1 (30 Juni 2021): 45–59. <https://doi.org/10.33363/tampung-penyang.v19i1.695>.
- Taufik, Muhammad, dan Ardillah Abu. "ISLAM DAN DEMOKRASI." *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 1 (3 Februari 2020): 1–14. <https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol1.Iss1.1>.
- Tsaniyah, Naimatus, dan Kannisa Ayu Juliana. "LITERASI DIGITAL SEBAGAI UPAYA MENANGKAL HOAKS DI ERA DISRUPSI." *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (30 Juni 2019): 121–40. <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1555>.
- Yumitro, Gondo. "Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia | Yumitro | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik." Diakses 25 Januari 2025. <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10892>.